



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) *TAHUN 2025***

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Bromo No. 03 Babadan Wlingi Blitar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Blitar serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Rancangan Akhir Rencana Kerja BPBD Kabupaten Blitar memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai selama satu tahun sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BPBD di Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan kegiatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien dengan menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar ini masih belum sempurna, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar sehingga tercapai keberhasilan kinerja yang diharapkan serta terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Blitar, 19 Agustus 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Blitar



**IVONG BERTTYANTO, ST. M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730518 199901 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra ....	9
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	18
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	19
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah .....	22
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; .....	23
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;.....	27
2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut .....	29
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
<b>BAB III.....</b>	<b>59</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>59</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	60
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>73</b>

<b>BAB V .....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Dokumen ini berisi perencanaan awal BPBD Kabupaten Blitar dalam Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari berbagai proses perencanaan, mulai dari perumusan visi, misi, hingga evaluasi program dan kegiatan sebelumnya, Rancangan akhir Rencana Kerja BPBD Kabupaten Blitar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang semuanya diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tugas dan fungsi BPBD sebagai Unsur Pelaksana di bidang Penanggulangan Bencana maka Pada Tahun 2025 BPBD perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam Penanggulangan Bencana dengan tetap mendasarkan paradigma Pengurangan risiko bencana yang adaptif dan fleksibel atas setiap perubahan lingkungan untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Langkah strategis tersebut tetap diarahkan pada upaya preventif pada masa pra bencana, responsive pada masa darurat, dan pemulihan yang mengedepankan pembangunan pascabencana yang lebih aman dan lebih baik dari sebelum terjadinya bencana. Ketiga upaya tersebut harus dilaksanakan dengan mengandalkan perencanaan, sistem, dan tata kelola yang baik oleh BPBD sendiri maupun sinergitas dan koordinasi yang efektif bersama pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat RPJMN yang menyatakan bahwa bencana merupakan urusan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan secara bergotong royong.

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota, dengan menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang memuat Tema **“Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah”** dengan prioritas pembangunan “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup” dan fokus pembangunan “Penguatan Mitigasi Bencana” dengan mengacu pada isu strategis nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana serta berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja PD selain berfungsi sebagai dokumen yang mengarahkan proses penganggaran daerah melalui R-APBD. Hal ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat didanai dan diimplementasikan secara efektif, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203);
15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana;
25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;

30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja ini bertujuan untuk mem finalisasi dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman operasional bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Rencana kerja BPBD telah diselaraskan dengan tema RKPD Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025, yaitu Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah.

BPBD Kabupaten Blitar menjadi penunjang prioritas pembangunan yang ke-5 (lima) berbunyi “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup” dengan fokus pembangunan “Penguatan Mitigasi Bencana”

Upaya pencapaian visi *“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun Toyyibatun, Warobbun Ghofur”* tersebut, BPBD Kabupaten Blitar menjalankan misi yang 4 (empat) yaitu ***Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.*** Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Blitar maka pada tahun 2025 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Kabupaten Blitar.

#### b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan akhir Renja PD adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan perencanaan;
- 2) pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) penganggaran dan evaluasi kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Bab ini berisi :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD dengan Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:
  1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- b. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian penjabaran Rencana Program dan Kegiatan

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut

## **LAMPIRAN**

Berisi dokumen yang mendukung proses penyusunan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dan sejauh mana capaian tersebut telah berkontribusi terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD. Pelaksanaan Renja tahun 2023 menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Blitar berhasil melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan, meskipun terdapat beberapa tantangan dan hambatan beberapa kegiatan berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.516.801.910,00 (*Sembilan belas milyar lima ratus enam belas juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.273.418.512,07,00 (*Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua belas rupiah poin nol tujuh*) atau sebesar (68,01%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Blitar**

**Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	01	2	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
1	05	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	20 orang/bulan	22 orang/bulan	19 orang/ bulan	100%	22 orang/bulan	18 orang/bulan	100%
1	05	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	219 dokumen	219 dokumen	189 dokumen	86%	1 laporan	200 dokumen	100%
1	05	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	4 dokumen	-	-	-	1 laporan	4 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024		
									Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan/ diklat/ bimtek/sosialisasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	3 orang	-	-		3 orang	-	-
1	05	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	-	-	-		50 orang	-	-
1	05	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	-	-	-		22 orang	-	-
1	05	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 jenis	3 paket	<b>100%</b>
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 jenis	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 jenis	2 paket	<b>100%</b>
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 jenis	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 jenis	4 paket	<b>100%</b>
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 eksemplar	2 paket	2 paket	2 paket	100%	22 eksemplar	2 paket	<b>100%</b>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 eksemplar	-	-	-	-	22 eksemplar	-	-
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 kali	186 laporan	186 laporan	284 laporan	152%	120 kali	-	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	-	-
1	05	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 unit	-	-	-	1 unit	-	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	1 laporan	100%
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 bulan	1 laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024		
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 bulan	1 laporan	100%	
1	05	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	1 kegiatan	30 unit	30 unit	100%	12 bulan	30 unit	100%	
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 unit	1 kegiatan	14 unit	6 unit	42%	124 unit	34 unit	27%	
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 jenis	1 unit	0	1 unit	100%	1 jenis	-	0	
1	05	03				<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					<b>Persentase penyelesaian dokumen pasca bencana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024		
									Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	03	2	01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	05	03	2	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	-	1 dokumen	2 dokumen	200%	1 dokumen	0	0
1	05	03	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	4 kegiatan	931.932 orang	563.302 orang	563.302 orang	100%	4 kegiatan	931.932	100%
1	05	03	2	02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>
1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	50%	100 orang	50 orang	50%
1	05	03	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	365 laporan	365 laporan	365 laporan	-	0	365 laporan	365 laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	4 unit	40%
1	05	03	2	02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	0
1	05	03	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 kawasan	8 kawasan	6 kawasan	13 kawasan	216%	6 kawasan	6 kawasan	100%
1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 orang	25 orang	25 orang	-	0	25 orang	-	0
1	05	03	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	100%	2 dokumen	-	0
1	05	03	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	-	300 orang	-	0	100 orang	-	0
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	03	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	60 menit	60 dokumen	60 menit	112 dokumen	100%	60 dokumen	60 dokumen	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	96 kegiatan	96 orang	100 orang	194 orang	194%	96 kegiatan	96 orang	100%
1	05	03	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 jenis	50 orang	100 orang	141 orang	141%	6 jenis	50 orang	100%
1	05	03	2	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25 orang	3 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	25 orang	3 laporan	100%
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	05	03	2	04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 dokumen	-	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1	05	03	2	04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 dokumen	2 dokumen	-	-	-	3 dokumen	-	-
1	05	03	2	04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 aplikasi		-	-	-	1 aplikasi	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun 2024	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 03 2 04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan		-	-	-	1 kegiatan	-	-

Blitar, Agustus 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Blitar



**IVONG BERTTYANTO, ST. M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730518 199901 1 001

### **2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan antara lain keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, kondisi lapangan dan cuaca yang ekstrem maupun keterlibatan, partisipasi masyarakat yang rendah maupun perubahan regulasi mendadak. Meski perencanaan telah dilakukan dengan seksama, dalam praktiknya, terdapat sejumlah program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil maupun keluaran yang telah ditetapkan.

a. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output pemeliharaan/servis atas 6 unit AC kantor dari target 14 unit AC karena keterbatasan anggaran.

b. *Program Penanggulangan Bencana*

Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, yaitu Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Wanita dan Pengarusutamaan Gender dalam Mitigasi Bencana, dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Difabel dalam Mitigasi Bencana yang karena keterbatasan anggaran yang semula direncanakan untuk 100 orang hanya dapat dilaksanakan untuk 50 orang peserta.

Pada tahun 2022 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mendapatkan hibah alokasi anggaran kegiatan pembangunan fisik/ bangunan pasca bencana yaitu rekonstruksi jembatan di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu dan rekonstruksi jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan, dengan mempergunakan dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di transfer pada akhir bulan Desember 2022, sehingga pada tahapan ini BPBD Kabupaten Blitar hanya dapat mempersiapkan DED untuk menunjang kegiatan tersebut, sedangkan realisasi fisik dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Teknis dalam hal ini Dinas PUPR. Pada tahun 2023 pelaksanaannya harus melalui perpanjangan dikarenakan situasi dan kondisi geografis dimana kontur lahan

lokasi Jembatan Dawuhan yang sangat curam sehingga mobilisasi alat berat mengalami kendala. Kondisi morfologi di lokasi yang terdiri dari batuan keras juga menyulitkan proses pengeboran sehingga harus dilakukan penggantian penyedia peralatan *bored pile*. Pergantian ini berdampak pada bertambahnya kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan. Adapun perpanjangan penyelesaian adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 sesuai Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6/MK.7/PK.3/2023 perihal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan. Namun pada tahun 2024 Pekerjaan Jembatan Dawuhan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia jasa setelah diberi 2x kesempatan perpanjangan waktu (putus kontak), dan saat ini telah berkontrak kembali pada tanggal 27 Juni 2024 sehingga diharapkan terselesaikan pada tahun 2024.

### **2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program/kegiatan yang telah memenuhi target adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* dengan output 2 dokumen perencanaan ( Renja Perubahan Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024) dan 10 dokumen Evaluasi Kinerja (LkjIP, LPPD, LKPJ, Evaluasi SPM, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Triwulanan), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 19 orang/bulan. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* dengan output Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor atas 3 paket alat listrik, *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* dengan output 2 paket Alat tulis kantor dan benda pos, *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* atas 4 paket bahan logistik kantor antara lain bahan kimia (handsanitizer), isi tabung gas, perabot kantor dan bahan natura, serta *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* dengan output 2 paket cetak dan penggandaan. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output laporan penyediaan biaya telepon dan Listrik, Laporan pemeliharaan unit komputer dan printer, Laporan penyediaan gaji THL dan penyediaan fasilitasi peresmian bangunan. Kegiatan *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* dengan output pengadaan 2

unit perahu rescue. Serta *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan output pembelian bahan bakar dan pelumas, suku cadang dan pembayaran pajak, dan bea perizinan atas 30 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- b. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota menjadi landasan penting dalam penyusunan dan realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Berpedoman pada peraturan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berhasil memenuhi target kinerja hasil maupun keluaran yang direncanakan untuk sejumlah program dan kegiatan strategis. Program kegiatan tersebut antara lain:

#### **A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

Kegiatan ini dicapai melalui Sub Kegiatan :

1. *Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana*, pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan kegiatan reviu atas dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang masa berlakunya telah mencapai lima tahun. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tetap relevan dan mampu mencerminkan kondisi risiko bencana terkini di wilayah yang menjadi tanggung jawab BPBD. Selain itu pada tahun 2023 melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyusun dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Kebakaran sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran serta penyusunan dokumen Kajian Kerentanan Sosial di Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kecamatan Wates sebagai upaya mitigasi terhadap ancaman bencana tsunami.
2. *Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)*, pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil mencapai target melalui kegiatan pemasangan rambu

kebencanaan di pada 6 kecamatan, yaitu di wilayah rawan bencana gempa bumi di Kecamatan Kanigoro, wilayah rawan bencana Gunung Api Kelud di Kecamatan Nglegok dan Ponggok, rawan bencana tsunami dan banjir rob di Kecamatan Wates, Bakung dan Wonotirto. Selain itu di setiap tahun melalui strategi penyebaran informasi yang efektif pemanfaatan berbagai media sosial serta pelaksanaan sosialisasi kebencanaan secara langsung kepada Masyarakat yang terstruktur, BPBD mampu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai potensi risiko bencana di wilayah mereka serta dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen BPBD dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana di wilayah mereka.

#### **B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan *sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan*. Salah satu output penting dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang disusun setiap tahun berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai kemampuan dan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar tidak hanya menyusun dokumen Indeks Kapasitas Daerah (IKD) sebagai bagian dari upaya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tetapi juga melaksanakan kegiatan penting lainnya berupa pembangunan talud (dinding penahan longsor) pada pemukiman di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar yaitu di Desa Bumirejo Kec. Kesamben, Desa Bacem Kec. Sutojayan, Desa Semen Kec. Gandusari, Desa Krisik Kec. Gandusari, Kelurahan Klemunan Kec. Wlingi, Desa Sawentar Kec. Kanigoro, dan Desa Plumbangan Kec. Doko.

**2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output 284 laporan perjalanan dinas dalam dan dinas luar dari target 186 laporan.
- b. Program Penanggulangan Bencana, melalui Kegiatan :
  1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari pelaksanaan kegiatan :
    - Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) Desa dari anggaran APBD, pada tahun 2023 BPBD berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan sosialisasi, edukasi, simulasi serta latihan kebencanaan, sehingga mampu melaksanakan pembentukan 4 Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yaitu kelurahan Kanigoro Kecamatan kanigoro, Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon, dan Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi, dan Desa Bacem Kecamatan Sutojayan. Sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk 37 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
    - Pembentukan Sekolah Aman Bencana yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) sekolah dari anggaran APBD, pada tahun 2023 mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa timur sehingga terbentuk 4(empat) Sekolah Aman bencana (SPAB) yaitu SMPN 1 Kanigoro, SMKN 1 Nglegok, SMPN 2 Garum serta SMAN 1 Kesamben. Sampai dengan tahun 2023 terbentuk 18 Satuan Pendidikan Aman Bencana.
  2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Kegiatan ini dicapai melalui sub kegiatan :
    - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota melalui Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat dengan

output 112 dokumen assesment pada setiap kejadian bencana.

- b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan kegiatan output pendataan, pemberian pertolongan dan evakuasi kepada 194 orang korban bencana.
- c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, kepada 141 orang penerima logistik kebencanaan.
- d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan output 3 laporan, yaitu atas Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak, Kekeringan, dan Hidrometeorologi yang terjadi di sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Blitar.

#### **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami berbagai dinamika dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan. Ada beberapa faktor yang berperan dalam tidak tercapainya, terpenuhinya, atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti sumber daya, kondisi lapangan, perencanaan dan pengelolaan, partisipasi dan kolaborasi, serta kebijakan dan regulasi memainkan peran penting dalam menentukan apakah BPBD dapat mencapai, tidak mencapai, atau melebihi target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2023. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi BPBD untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang, guna memastikan peningkatan kinerja dan efektivitas dalam pelaksanaan program-programnya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar pada tahun 2023 telah berhasil mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tiga siklus secara lengkap, yaitu

siklus pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa seluruh aspek penanggulangan bencana diperhatikan dengan baik, dari upaya pencegahan hingga pemulihan.

Pada masa pra bencana, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan masyarakat, antara lain :

a. Siklus Pra Bencana: Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pada siklus pra bencana, BPBD Kabupaten Blitar fokus pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Penyuluhan dan Edukasi: BPBD melakukan sosialisasi kebencanaan kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan Desa/kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah Aman Bencana (SPAB), Pelatihan Kebencanaan kepada kelompok rentan (wanita maupun difabel) maupun kepada kelompok Masyarakat lain mengenai langkah-langkah mitigasi bencana, Selain itu melaksanakan penyuluhan dan edukasi melalui media sosial serta melalui kegiatan pemasangan rambu kebencanaan di wilayah rawan bencana.
- Penyusunan Dokumen Kebencanaan: Dokumen-dokumen strategis seperti Kajian Risiko Bencana, Kajian Kerentanan Sosial Di Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kecamatan Wates, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Blitar disusun untuk memetakan risiko bencana dan merancang langkah-langkah mitigasi.
- Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan talud (dinding penahan longsor) pada pemukiman di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar yaitu di Desa Bumirejo Kec. Kesamben, Desa Bacem Kec. Sutojayan, Desa Semen Kec. Gandusari, Desa Krisik Kec. Gandusari, Kelurahan Klemunan Kec. Wlingi, Desa Sawentar Kec. Kanigoro, dan Desa Plumbangan Kec. Doko. dan fasilitas penunjang

lainnya yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan mengurangi kerentanan terhadap bencana.

b. Siklus Saat Bencana: respons dan penanggulangan, saat bencana terjadi, BPBD Kabupaten Blitar menjalankan kegiatan respons dan penanggulangan secara cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Koordinasi dan Penanggulangan: BPBD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengelola situasi darurat, termasuk penyediaan bantuan darurat seperti sandang, makanan, obat-obatan, dan logistik kebencanaan lainnya. Dalam menghadapi situasi darurat bencana, koordinasi yang efektif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pemerintah provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam penyediaan bantuan darurat tersebut. Pada tahun 2023 terjadi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Blitar mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar, mencakup Kecamatan Wates, Binangun, Wonotirto, Panggungrejo dan Gandusari. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berkolaborasi dengan dunia usaha melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Hiswana Migas, Bank BRI dan RSUD AULIA. Tercatat, sampai dengan akhir tahun 2023, kurang lebih 15 sejumlah 1.788.000 liter air bersih telah terdistribusi kepada sekitar 1.589 KK yang terdampak kekeringan.
- Evakuasi dan Penyelamatan: Proses evakuasi dilakukan untuk mengamankan masyarakat dari area bencana, serta operasi penyelamatan untuk membantu korban yang terjebak atau terkena dampak langsung. Kegiatan evakuasi dan penyelamatan merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya penanggulangan bencana, di mana keselamatan jiwa menjadi prioritas utama. Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar telah sukses melaksanakan

kegiatan evakuasi dan penyelamatan dalam berbagai situasi darurat, berkat kolaborasi erat dengan berbagai pihak termasuk TNI, Polri, tim medis, SAR, relawan, masyarakat, dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Kerja sama ini tidak hanya mempercepat proses penyelamatan, tetapi juga meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada korban, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko yang lebih besar dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk bertahan dalam situasi darurat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

- Penyebaran Informasi: Informasi terkini tentang kondisi bencana dan langkah-langkah yang harus diambil disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial yang ada (Website, WA Grup, Instagram, Facebook, Twitter).

c. Siklus Pascabencana: Pemulihan dan Rehabilitasi

Setelah bencana, BPBD fokus pada kegiatan pemulihan dan rehabilitasi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dalam upaya pemulihan pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Salah satunya melaksanakan *mandatory* Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi 2 jembatan, yaitu Jembatan Desa Tunjung Kecamatan Udanawu yang selesai pada Desember 2023 dan Jembatan Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan yang pelaksanaannya harus melalui perpanjangan dikarenakan situasi dan kondisi geografis dimana kontur lahan lokasi Jembatan Dawuhan yang sangat curam sehingga mobilisasi alat berat mengalami kendala. Kondisi morfologi di lokasi yang terdiri dari batuan keras juga menyulitkan proses pengeboran sehingga harus dilakukan penggantian penyedia peralatan *bored pile*. Pergantian ini berdampak pada bertambahnya kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sampai dengan akhir tahun 2023 Pekerjaan Jembatan Dawuhan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia jasa (putus kontak), dan saat ini telah berkontrak kembali pada tanggal 27 Juni 2024 sehingga diharapkan terselesaikan pada tahun 2024.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar juga melaksanakan *cost sharing* dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyediaan hunian bagi korban bencana alam tanah gerak melalui Pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Cuaca Ekstrim pada musim penghujan di sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023 telah menyebabkan banyak terjadinya bencana hidrometeorologi maupun geologi, termasuk fenomena gerakan tanah yang mengakibatkan kerusakan permukiman serta sarana prasarana vital di Kabupaten Blitar. Sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keamanan dan keselamatan terhadap masyarakat terdampak tanah gerak maka dilaksanakan Pembangunan Hunian Sementara diatas lahan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pembangunan ini dilakukan untuk merelokasi 14 warga yang terdampak bencana tanah gerak. Dilaksanakan melalui 2 Tahap. Tahap pertama dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Wates sejumlah 50 unit. Tahap kedua dilaksanakan di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo sejumlah 47 unit, Desa Maron Kecamatan Kademangan sejumlah 11 unit, serta di Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo sejumlah 10 unit. Pembangunan Hunian Sementara diharapkan mampu mengurangi risiko dan korban bencana yang mungkin ditimbulkan akibat terjadinya bencana serupa.

#### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar berfungsi sebagai pedoman jangka menengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Namun, berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi pencapaian target-target

yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Pada tahun 2023, beberapa implikasi penting muncul yang berdampak signifikan terhadap capaian program BPBD.

1. Implikasi Akibat Bencana Alam Tak Terduga

Bencana alam yang terjadi secara tak terduga seperti Tanah Gerak, Kekeringan, dan Hidrometeorologi menimbulkan dampak yang luas dan kompleks. Bencana ini memaksa BPBD untuk mengalihkan sebagian besar sumber daya yang telah dialokasikan untuk program jangka panjang ke upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Akibatnya, beberapa program dalam Renstra, seperti peningkatan kapasitas masyarakat atau pengembangan sistem peringatan dini, mungkin tidak tercapai sesuai target yang telah direncanakan.

2. Implikasi dari Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan dapat berimplikasi pada pencapaian target Renstra BPBD. Misalnya, kebijakan baru yang mengharuskan penyesuaian anggaran atau perubahan prioritas program dapat menyebabkan penundaan atau pengurangan dalam pelaksanaan program yang direncanakan. Hal ini mempengaruhi capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra, memaksa BPBD untuk meninjau kembali strategi dan rencana kerja yang ada.

3. Implikasi dari Dukungan Anggaran yang Fluktuatif

Ketersediaan anggaran yang fluktuatif, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber lain, memiliki dampak langsung terhadap realisasi program-program yang telah direncanakan. Ketidakpastian dalam alokasi anggaran dapat menghambat pelaksanaan program penting, seperti pengadaan peralatan penanggulangan bencana atau pelatihan bagi petugas dan relawan. Jika dukungan anggaran tidak memadai, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra mungkin tidak dapat dicapai, atau hanya dapat dicapai sebagian.

4. Implikasi dari Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia juga berperan penting dalam pencapaian target Renstra BPBD. Kekurangan tenaga ahli, terbatasnya pelatihan, atau masalah koordinasi antarinstansi dapat menjadi hambatan dalam

implementasi program. Selain itu, perubahan dalam struktur organisasi atau peraturan yang mengatur fungsi BPBD dapat menimbulkan tantangan baru yang memerlukan penyesuaian strategi untuk tetap mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Untuk memastikan pencapaian target program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan dan penganggaran. Beberapa faktor seperti bencana alam tak terduga, perubahan kebijakan, fluktuasi anggaran, dan kendala kelembagaan memerlukan kebijakan dan tindakan yang terukur untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan target tetap tercapai.

- a. Selalu melakukan koordinasi perencanaan terkait dengan kebutuhan anggaran yang akan diimplementasikan dalam kegiatan sesuai dengan prioritas.
- b. Memperkuat dan meningkatkan regulasi mengenai penanggulangan bencana sebagai payung hukum dalam melakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang lebih efektif, cepat dan tepat sasaran dalam melayani masyarakat.
- c. Penekanan titik berat upaya penanggulangan bencana pada pengurangan risiko bencana dengan tujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat,
- d. Peningkatan kapasitas aparatur BPBD Kabupaten Blitar sehingga berdaya guna dan mampu menjadi pelaku penanggulangan bencana yang efektif dalam mencapai sasaran pelaksanaan penanggulangan bencana yang komprehensif pada tiga fase bencana.
- e. Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi, BPBD perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Pengembangan sistem pemantauan bencana berbasis teknologi yang dapat memberikan informasi real-time tentang potensi bencana, sehingga BPBD dapat melakukan langkah-langkah

pengecehan lebih awal. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data bencana, alokasi sumber daya, dan pelaporan kinerja, yang semuanya penting untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

- f. Penguatan Koordinasi Antar instansi, bencana alam sering kali memerlukan keterlibatan berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, BPBD harus memperkuat koordinasi dengan instansi lain, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, TNI, dan Polri serta relawan. Koordinasi yang kuat akan memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia dapat dimobilisasi dengan cepat dan efektif saat terjadi bencana. Selain itu, BPBD juga dapat membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan bantuan logistik dan infrastruktur dalam keadaan darurat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dan sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka secara garis besar BPBD Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dalam Penanggulangan Bencana. Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, dan menyikapi keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah antara lain :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan

#### d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Selaras dengan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana yang menjadi kewenangan BPBD dalam penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD dalam Rencana Strategis lima tahunan dan yang secara berkala diukur dalam evaluasi perencanaan tahunan BPBD, yaitu :

1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
2. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengadopsi dan Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana
3. Persentase Jiwa Terdampak Bencana yang Terselamatkan
4. Rata-rata Kenaikan indeks pemulihan Pasca bencana

Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan aspek krusial dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengukur kinerja ini secara efektif dan akuntabel, digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKK berfungsi sebagai alat evaluasi yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan tersebut ditunjukkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Blitar**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase layanan penanganan pra bencana	v	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase layanan penanganan tanggap darurat	v	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase layanan penanganan pasca bencana	v	v	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	Pada tahun 2023 tidak tercapai target karena hambatan kondisi teknis lapangan
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	v	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel 2.2 dapat dianalisis bahwa:

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) atas *persentase layanan penanganan pra bencana* menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana target yang telah ditetapkan selalu tercapai setiap tahunnya. Layanan penanganan pra bencana mencakup berbagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. BPBD Kabupaten Blitar telah secara konsisten melaksanakan berbagai program penanganan pra bencana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Program-program ini meliputi penyusunan dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan, Rencana Kontinjensi bencana, dokumen IKD), sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat (sarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perkantoran maupun komunitas masyarakat lainnya), , pelatihan kesiapsiagaan melalui Pembentukan Destana, SPAB, Pelatihan kepada kelompok rentan, FPRB, relawan serta pelaksanaan sosialisasi kebencanaan yang secara rutin dilakukan melalui media sosial.

Selain mitigasi non struktural tersebut layanan penanganan pra bencana dilaksanakan melalui kegiatan mitigasi non struktural yaitu melalui upaya-upaya fisik yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang kuat dan tahan bencana. BPBD Kabupaten Blitar telah melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi struktural, seperti pembangunan talud, dinding pengaman longsor permukiman, serta pemasangan rambu-rambu peringatan bencana di wilayah-wilayah rawan.

Beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini termasuk perencanaan yang matang, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, adanya alokasi anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah pusat serta pemprov juga memainkan peran penting dalam memastikan terlaksananya program-program pra bencana dengan baik.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar telah konsisten mencapai target Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait dengan *persentase layanan penanganan tanggap darurat* setiap tahunnya. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan kesiapsiagaan BPBD dalam merespons berbagai kejadian bencana dengan cepat dan efektif, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Sejak beberapa tahun terakhir, BPBD Kabupaten Blitar berhasil mencapai dan bahkan melampaui target IKK dalam penanganan tanggap darurat. Capaian ini menunjukkan bahwa BPBD telah membangun sistem yang kokoh dan efisien dalam menghadapi berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. BPBD memastikan bahwa respon terhadap kejadian darurat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat sebagai langkah awal dan landasan operasional. SK Tanggap Darurat ini berfungsi sebagai instrumen penting yang memberikan kerangka hukum dan administratif bagi BPBD serta semua pihak terkait untuk segera bertindak dalam situasi bencana sehingga kerugian dan dampak negatif bencana dapat diminimalisir. Dalam upaya penanganan tanggap darurat, pemberian bantuan logistik menjadi salah satu prioritas utama, bantuan ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, perlengkapan medis, dan tempat tinggal sementara bagi para korban bencana dan perlengkapan logistik kebencanaan lainnya. BPBD bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta.
3. *Persentase layanan penanganan pasca bencana*. Kegiatan pada pemenuhan IKK ini antara lain penyusunan Dokumen Penanganan Pasca Bencana melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), serta pada tahun 2022 melaksanakan *mandatory* Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi 2 jembatan yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala teknis lapangan sehingga pada tahun 2023 belum dapat terselesaikan.
4. *Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal*, pada pemenuhan target IKK tersebut BPBD telah melaksanakan kegiatan regulasi tentang Penanggulangan

Bencana, Pedoman Pelaksanaan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Unit Reaksi Cepat Dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar. Dengan legalitas yang kuat, dokumen-dokumen ini menjadi dasar hukum yang memastikan bahwa setiap langkah penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;

BPBD terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan bencana di seluruh tahapan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat/warga Kabupaten Blitar. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada warga negara agar diketahui ancaman bencana yang dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana harus dilaksanakan sesegera mungkin karena keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana. Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat beberapa hal kritis yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personil maupun peralatan, yang terkadang menghambat efektivitas operasi di lapangan. Meski BPBD telah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui

kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kapasitas tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, terutama dalam situasi bencana yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Meskipun ada kemajuan dalam hal ini, kesenjangan dalam komunikasi dan penyelarasan prioritas kadang kala dapat memperlambat proses penanganan bencana. Kritik lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya peningkatan dalam hal penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat masih bervariasi, yang berdampak pada tingginya risiko dan kerugian yang diderita saat bencana terjadi. BPBD menyadari bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, BPBD berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara menyeluruh.

## 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana, BPBD memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari berbagai jenis bencana. Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini meliputi jumlah personel yang tidak selalu sebanding dengan luasnya wilayah yang harus dilayani serta kekurangan dalam peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk operasi tanggap darurat. Keterbatasan ini sering kali menghambat respons cepat dan penanganan yang efektif di lapangan, terutama saat menghadapi bencana berskala besar atau terjadi secara bersamaan di beberapa lokasi.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan yang signifikan. Penanganan bencana melibatkan banyak instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta berbagai organisasi non-pemerintah dan masyarakat. Meskipun telah ada mekanisme koordinasi yang ditetapkan, terkadang perbedaan prioritas,

kurangnya komunikasi yang efektif, dan tumpang tindih wewenang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi di lapangan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana masih menjadi masalah yang harus dihadapi. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mitigasi dan tindakan preventif, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap dampak bencana. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD sering kali terbentur dengan minimnya partisipasi aktif dari masyarakat, serta keterbatasan dalam menyampaikan informasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Terakhir, kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak merata di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas BPBD. Wilayah yang jauh, terutama saat kondisi cuaca ekstrem, menyulitkan tim BPBD dalam melakukan evakuasi, pengiriman logistik, dan penyelamatan korban.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta kontribusi terhadap program-program nasional dan internasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Rencana pembangunan daerah dengan Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026 yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR” Dalam mendukung Misi Bupati Blitar, BPBD Kabupaten Blitar menjalankan misi yang 4 (empat) yaitu : Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan dengan Tujuan Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana dan Bahaya Iklim dengan mendorong Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB. Keberhasilan BPBD dalam melaksanakan tugasnya secara

langsung mendukung pencapaian cita-cita pembangunan daerah tersebut.

Sebagai upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, maka BPBD Kabupaten Blitar menjalankan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana telah sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Secara global, BPBD juga berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penanganan bencana yang efektif berkontribusi pada tujuan SDGs antara lain Tujuan 1 Tanpa kemiskinan, Tujuan 11 Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan, Tujuan 13 Perubahan Iklim serta Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh. Dengan mendukung tujuan tersebut dapat mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana, membantu mencegah kemiskinan yang sering kali meningkat setelah bencana besar. Program mitigasi bencana yang dijalankan oleh BPBD juga berperan dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Melalui komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam penanganan bencana, BPBD tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat terus berjalan dengan risiko yang minimal dan dampak positif yang maksimal.

#### 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak penanganan bencana, BPBD dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Namun, di balik setiap tantangan, terdapat peluang untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, BPBD terus mencari cara untuk berinovasi dan membangun kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak.

*Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan:*

- e. Kabupaten Blitar memiliki multi bahaya antara lain : Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Cuaca Ekstrem (Angin Kencang), Gelombang Ekstrem dan abrasi, Likuefaksi serta Kebakaran Gedung dan Pemukiman. (*Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar 2024-2029*).
- f. Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPBD adalah keterbatasan sumber daya. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana, kebutuhan akan personel, peralatan, dan dana yang memadai menjadi semakin mendesak. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan BPBD untuk memberikan respons yang cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat yang melibatkan banyak korban atau kerusakan yang luas.
- g. Koordinasi lintas sektor juga menjadi tantangan signifikan. Penanganan bencana memerlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Sering kali, perbedaan prioritas, kurangnya komunikasi, dan prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat upaya penanganan bencana. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur dan integratif dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan.
- h. Perubahan iklim dan dampaknya yang semakin nyata menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi BPBD. Bencana yang terkait dengan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai, semakin sering terjadi dan sulit diprediksi. BPBD perlu terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang lebih inovatif untuk menghadapi tantangan ini.

*Peluang untuk Meningkatkan Pelayanan:*

- a. Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- b. Adanya dukungan pendanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- c. Partisipasi organisasi non pemerintah, komunitas masyarakat dan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana

- d. Nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat dipegang oleh masyarakat
  - e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, BPBD dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam respons bencana, aplikasi pelaporan bencana berbasis masyarakat, serta platform komunikasi yang lebih efisien untuk koordinasi antar lembaga.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, BPBD perlu mengidentifikasi isu-isu penting yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan bencana di masa mendatang. Berdasarkan analisis mendalam terhadap pengalaman dan kondisi saat ini, beberapa rekomendasi dan catatan strategis telah diformulasikan untuk dijadikan panduan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan datang.

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. BPBD perlu memastikan bahwa personel yang terlibat dalam penanganan bencana memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi, termasuk penanganan multi bahaya dan penggunaan teknologi terbaru. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan, simulasi bencana, dan program sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan kesiapan dan responsivitas tim BPBD.
- b. Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih sangat diperlukan untuk memantau dan merespons situasi bencana dengan lebih efektif. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem peringatan dini berbasis multi-hazard, memodernisasi pusat data dan komunikasi darurat, serta mengimplementasikan aplikasi berbasis komunitas untuk pelaporan bencana secara real-time.
- c. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi Antar Lembaga, koordinasi lintas sektor yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas penanganan bencana, terutama dalam situasi

multi bahaya. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta komunitas lokal untuk memperkuat jaringan penanggulangan bencana dan memastikan respons yang terkoordinasi dan efisien.

- d. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Partisipasi Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana merupakan faktor kunci dalam membangun ketangguhan komunitas. Mengembangkan program edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas, memperkuat peran desa tangguh bencana, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam simulasi bencana serta kegiatan mitigasi lainnya.
- e. Pengelolaan Risiko dan Perubahan Iklim, perubahan iklim yang terus berlangsung menambah kompleksitas risiko bencana di berbagai wilayah. Rekomendasi: Mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim ke dalam program penanggulangan bencana, mengembangkan skenario mitigasi risiko bencana yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kerjasama internasional untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam penanganan bencana terkait iklim.
- f. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Monitoring dan evaluasi yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan BPBD. Rekomendasi: Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, mengadakan review berkala terhadap pelaksanaan program, dan mengadaptasi strategi sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan situasi bencana.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dengan mengacu pada tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi” dengan Prioritas pembangunan ke 5 “5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup” fokus pembangunan “Penguatan Mitigasi Bencana” BPBD Kabupaten Blitar bertanggung jawab dalam mewujudkan strategi

meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam fase pra, saat dan pascabencana bagi masyarakat di Kabupaten Blitar.

Strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 dicapai melalui program Penanggulangan Bencana dengan empat kegiatan utama yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, BPBD Kabupaten Blitar memiliki program rutin Penunjang urusan pemerintah daerah yang mencakup kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang berusaha dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diharapkan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Blitar juga akan semakin mudah dicapai.

Hasil analisis kebutuhan yang merupakan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dijabarkan kedalam daftar program dan kegiatan BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Blitar**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kab.Blitar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	4.728.116.855	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kab.Blitar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	3.353.209.815	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100%	34.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100%	0	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	23.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	11.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	0	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.621.616.855	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.078.640.707	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.521.566.855	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.062.980.707	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	82.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 dokumen	15.660.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.bitar	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	1 laporan	17.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	0	0	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/ bimtek/ sosialisasi	100%	135.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/ bimtek/ sosialisasi	100%	0	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	45.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	45.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan layanan	100%	294.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan layanan	100%	461.348.452	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			administrasi umum perkantoran					administrasi umum perkantoran			
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.650.345	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 jenis	37.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	206.156.947	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 jenis	13.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	13.522.311	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 eksemplar	28.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.048.849	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	22 eksemplar	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 kali	182.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	226.060.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	0	0	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	190.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	110.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	716.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	702.921.448	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.350.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan	1 laporan	14.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah			
1.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	640.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	661.971.448	
1.7.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100%	627.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Blitar	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100%	110.209.208	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	104.109.208	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 unit	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	6.100.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 jenis	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	
2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN</b>	Kab.Blitar	1. Persentase warga negara yang	100%	3.270.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN	Kab.Blitar	1. Persentase warga negara yang	100%	636.338.392	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>BENCANA</b>		memperoleh layanan informasi rawan bencana			BENCANA		memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Kab.Blitar	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			Kab.Blitar	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		
		Kab.Blitar	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			Kab.Blitar	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		
		Kab.Blitar	4. Persentase penyelesaian dokumen pascabencana	100%			Kab.Blitar	4. Persentase penyelesaian dokumen pascabencana	100%		
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan	100%	300.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan	100%	32.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			informasi rawan bencana					informasi rawan bencana			
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	4 kegiatan	300.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab.Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	874.378 orang	32.500.000	
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Blitar	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	1.590.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Blitar	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	455.425.892	
2.2.1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas)	1 kegiatan	100.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas)	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/Kota yang tertangani					Kabupaten/Kota yang tertangani			
2.2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 jenis	90.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0	0	
2.2.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	230.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0	0	
2.2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 kawasan	410.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 kawasan	346.026.040	
2.2.5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 orang	130.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	0	
2.2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	0	
2.2.7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis	365 laporan	90.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya					ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
2.2.8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	75.000.000	
2.2.9	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 orang	240.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 kawasan	34.399.852	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Blitar	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	880.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Blitar	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	93.352.500	
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	60 menit	180.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 dokumen	15.060.000	
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Kab.Blitar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	96 kegiatan	90.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Kab.Blitar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	50 orang	9.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bencana Kabupaten/Kota		Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			Bencana Kabupaten/Kota		Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
2.3.3	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	0	
2.3.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0	
2.3.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 jenis	510.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 orang	58.125.000	
2.3.5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25 orang	100.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 laporan	11.167.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	500.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	55.060.000	
2.4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 dokumen	50.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0	
2.4.2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	
2.4.3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab.Blitar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 aplikasi	50.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab.Blitar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	0	
2.4.4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab.Blitar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	
2.4.5	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Kab.Blitar	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang	0	0	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Kab.Blitar	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bencana Kabupaten/Kota		memiliki kompetensi			Bencana Kabupaten/Kota					
2.4.6	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	0	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	0	
2.4.7	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	2 dokumen	350.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	18.060.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4.8	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	0	
2.4.9	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab.Blitar	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab.Blitar	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0	
2.4.10	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4.11	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab.Blitar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	37.000.000	

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan menunjukkan adanya perbedaan anggaran yang signifikan. Perbedaan ini mempengaruhi beberapa program dan kegiatan, yang mengakibatkan perlunya penyesuaian pada output yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, besaran alokasi anggaran yang lebih rendah dari kebutuhan awal memerlukan revisi terhadap skala atau cakupan program, sehingga hasil akhir dapat tetap tercapai meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menilai relevansi, urgensi, dan kelayakan usulan tersebut, serta untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi komunitas lokal.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah serta melalui pokok-pokok pikiran Dewan. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar tahun 2025.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dan Pokok Pikiran Dewan dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025**  
**Kabupaten Blitar**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program penanggulangan bencana	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Kawasan yang	75 orang/ 1 kawasan	Pembentukan Desa/kelurahan Tangguh Bencana dan Forum pengurangan Risiko Bencana
2.	Kegiatan penguatan Kapasitas	Desa Kalitengah	Ditingkatkan Kapasitasnya dalam	50 orang/ 1 kawasan	
3.	Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa Selokajang	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50 orang/ 1 kawasan	
4.		Desa Salamrejo	Bencana	50 orang/ 1 kawasan	

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025**  
**Kabupaten Blitar**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program penanggulangan bencana Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Garum , Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	50 orang/	Sosialisasi Kebencanaan

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan beragam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan kebijakan nasional, RPJMD, Renstra serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2025. Tujuan ini adalah untuk membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, serta respon yang cepat dan efektif terhadap setiap kejadian bencana.

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah proses analisis kritis untuk memastikan bahwa strategi, program, dan kegiatan BPBD di tingkat daerah selaras dengan arahan dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 dalam Lampiran Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Lampiran Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim. Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 yaitu Tanpa kemiskinan, Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan, Perubahan Iklim serta Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh. Serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Telaah akan kebijakan nasional dan visi misi Pemerintah Daerah menjadi dasar untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026. Mengacu kepada RPJMD 2021-2026 maka ditetapkan tujuan pembangunan BPBD yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Blitar 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Dan Sasaran BPBD Kabupaten Blitar**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas Layanan penanggulangan bencana	Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
		Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan
		Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Blitar ditekankan pada upaya penanggulangan bencana yang mencakup tiga fase. Pada masa prabencana dengan indikator sasaran Persentase Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pada masa tanggap darurat ditetapkan indikator sasaran Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan, dan pada masa pascabencana diukur melalui indikator sasaran Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana. Sasaran tersebut menjadi satu rangkaian siklus penanggulangan bencana yang capaiannya dapat diukur dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

Dalam merumuskan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tahun 2025, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan. Faktor-faktor ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya relevan dan efektif, tetapi juga sejalan dengan tujuan strategis dan kebutuhan

masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dipertimbangkan:

- a. Menyesuaikan program dengan arah kebijakan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 yaitu "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".
- b. Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 yaitu Tanpa kemiskinan, Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan, Perubahan Iklim serta Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh.
- c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.
- d. Pencapaian visi dan misi Bupati Blitar Tahun 2021-2025, yaitu Visi "Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur" dan Misi "Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan"
- e. Tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi" dengan Prioritas pembangunan ke 5 "5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup" fokus pembangunan "Penguatan Mitigasi Bencana"
- f. Tujuan dan Sasaran Strategis yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.
- g. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pokok pikiran para pemangku kepentingan.
- h. Evaluasi terhadap program dan kegiatan BPBD yang telah dilaksanakan sebelumnya.

## 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Tahun

Tahun 2025 jumlah program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Blitar adalah sebanyak 2 program dan 9 kegiatan serta 24 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan

program/kegiatan sebesar Rp 3.989.548.207,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2025 didanai sepenuhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai inisiatif penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan, guna memastikan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2025 dirancang dengan memperhatikan penyebaran geografis dan kebutuhan spesifik masyarakat. Beberapa program, seperti kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, tersebar luas ke berbagai kawasan di Kabupaten Blitar, termasuk daerah rawan bencana. Sementara itu, kegiatan yang lebih spesifik, seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, difokuskan pada kelompok masyarakat yang rentan dan daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kawasan dan komunitas mendapatkan perhatian yang sesuai dengan tingkat kerentanannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tahun 2025, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketidaksesuaian ini mencakup perbedaan dalam jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, serta dalam beberapa kasus, kombinasi dari keduanya.

- a. **Perbedaan Jenis Program/Kegiatan:** Beberapa program dan kegiatan yang dirumuskan berbeda dari yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kondisi terkini di lapangan, termasuk hasil analisis yang menunjukkan kebutuhan akan program yang lebih relevan dan berdampak yaitu penyusunan

Dokumen RPB yang telah habis masa berlaku sehingga dibutuhkan reviu atas dokumen tersebut.

- b. **Perbedaan Pagu Indikatif:** Perubahan dalam pagu indikatif juga terjadi, yang disebabkan oleh perhitungan ulang kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas yang diperbarui serta alokasi dana yang tersedia. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dijabarkan pada tabel berikut ini:



No	Kode			Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Realisasi RPJMD 2023	Realisasi Capaian RPJMD 2023	Pembinaan Capaian Target RPJMD 2023	Capaian Kinerja dan Eradikasi Permasalahan					Kategori Sasaran	Pembinaan Monev Perencanaan 2024		Peringkat Dunia Realisasi 2023	
									Target 2023	Page Indikatif (Kj)	Isi Baru	Sembelit Baru	Program		Page Indikatif (Kj)	Page Indikatif (Kj)		
													Masruah					Darurat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	05	01	2 03	0010	Sosialisasi Praktek Peradag-Undangan	Jumlah Uang yang Menggali Sosialisasi Praktek Peradag-Undangan			300	0,00	Sak Bkai, Sema Decumala, Sema Tel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday		50 000 000,00	SADAM P7 HANGGULANCAH BHCANA DAFAAH	
1	05	01	2 03	0011	Bimkgas Fetal Implementasi Praktek Peradag-Undangan	Jumlah Uang yang Menggali Bimkgas Fetal Implementasi Praktek Peradag-Undangan			220	0,00	Sak Bkai, Sema Decumala, Sema Tel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday		50 000 000,00	SADAM P7 HANGGULANCAH BHCANA DAFAAH	
1	05	01	2 06		Administrasi Umum Prastat Daerah	Prastat bca bapa layaaa administrasi an an prastat aa	100 Perse 100 Perse		100 %	461 438 432,00				PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday	100 Perse 100 Perse	302 000 000,00		
1	05	01	2 06	0001	Penyediaan Sampara Isolasi	Jumlah Fabel Sampara Isolasi Isolasi/Peralagan Bagaaan Sastoi yang Durditaa			1	Fabel	4 930 343,00	Sak Bkai, Sema Decumala, Sema Tel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday		11 000 000,00	SADAM P7 HANGGULANCAH BHCANA DAFAAH
1	05	01	2 06	0002	Penyediaan Pralalaaas Pradagbapa Sastoi	Jumlah Fabel Pralalaaas Pradagbapa Sastoi yang Durditaa			3	Fabel	209 136 947,00	Sak Bkai, Sema Decumala, Sema Tel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday		33 000 000,00	SADAM P7 HANGGULANCAH BHCANA DAFAAH
1	05	01	2 06	0004	Penyediaan Baka Logabab Sastoi	Jumlah Fabel Baka Logabab Sastoi yang Durditaa			3	Fabel	13 322 311,00	Sak Bkai, Sema Decumala, Sema Tel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday		14 000 000,00	SADAM P7 HANGGULANCAH BHCANA DAFAAH
1	05	01	2 06	0003	Penyediaan Bakaag Celabaa Dan Paggadaaa yang Durditaa	Jumlah Fabel Bakaag Celabaa Dan Paggadaaa yang Durditaa			1	Fabel	11 040 349,00	Sak Bkai, Sema Decumala, Sema Tel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		PS - Monevage Harmoni Sosial Dan Alam Deegan Mewaklaba Dek adayaan Dan Lingbeagan Hiday PP-3 Permas Lapaa Infiasite Maki fto somuor lla Daya Debe ag Ungbeagan Hday		23 000 000,00	SADAM P7 HANGGULANCAH BHCANA DAFAAH





No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Realisasi OPD	Realisasi Capaian KPI MA OPD Tahun 2023	Triahun Capaian Target KPI MA OPD	Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan						Belanja Potensial	Triahun Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Page Indikatif (Rp)	Isi	Sumber Dana	Fasilitas			Target	Page Indikatif (Rp)		
											Normal	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	03	03	2 01	0901	Soukubau, Soukubau, Informasi dan Hiburan (DI) Kawas Berencana Sakapala/Sola (Per. Pris. Asrama Berencana)			3743700	0	Isi							
					Isiah Waig agawa (remanat belom pot mata di barwasan urwas berencana berencana Sakapala/Sola yang me nyerok belom pot mata, informasi dan Hiburan (DI) Kawas berencana yang ada di barwasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun												
1	03	03	2 02		Pelayanan Perogakan dan Soukupagan Perikaday Berencana			100%	0	Isi				100%	1613000000,00		
					penyediaan dan/ belabab di barwasan subotling yang me nyerok belabab layanan perogakan dan Soukupagan												
1	03	03	2 02	0913	Penyediaan Kuto Berencana Sakapala/Sola			0	Regulan	0,00							
					Isiah kegiatan penyediaan abal mamalah kuto berencana (pri pris. asrama berencana priotab.) Sakapala/Sola yang terlanagan												
1	03	03	2 02	0915	Penyediaan Fasilitas Perikaday dan Soukupagan Perikaday Berencana Sakapala/Sola			0	Isi	0,00							
					Isiah Fasilitas Penyediaan Di bag Indivi Waig Mngas, Mngas, mangas Perogakan dengan pris. asrama berencana di barwasan tempat tinggalnya												
1	03	03	2 02	0918	Studi Soukupagan Perikaday Berencana Sakapala/Sola			0	Isi	0,00							
					Isiah Waig agawa yang me ngikuti studi Soukupagan abal me ngikuti KPI MA OPD dan belabab agawa barwasan priotab dalam penyediaan oprusu penyediaan dan abal berencana (pri pris. asrama) Sakapala/Sola												
1	03	03	2 02	0920	Perogakan Kapulas Barwasan abal Perogakan dan Soukupagan Berencana			0	Barwasan	546 026 040,00							
					Isiah barwasan urwas berencana (pri pris. asrama berencana) dan/ abal barwasan-barwasan subotling Sakapala/Sola yang me miliki me barwasan dan pord abal Soukupagan me ngadab abal berencana												
1	03	03	2 02	0921	Perogakan Kapulas dan Hiburan (DI) Berencana Sakapala/Sola			0	Isi	0,00							
					Isiah perogakan dan Hiburan (DI) Perogakan Berencana (KPI MA OPD) Sakapala/Sola yang belabab dari belabab dan/ abal yang me miliki belabab dan abal perogakan dan abal berencana												
1	03	03	2 02	0922	Penyediaan Rencana Soukupagan Sakapala/Sola			0	Dokumen	0,00							
					Isiah Dokumen Rencana Soukupagan Sakapala/Sola (pri pris. asrama berencana) belabab dengan di eyalabab sub/legat paling lama dalam 1 (satu) tahun												
1	03	03	2 02	0926	Penyediaan Oprusu dan Penyediaan Barwasan Priotab Soukupagan Perikaday Berencana Sakapala/Sola			0	Layanan	0,00							
					Isiah layanan oprusu dan penyediaan barwasan priotab Soukupagan Perikaday Berencana Sakapala/Sola yang me miliki oprusu (subotling) dengan Maltimal. Pelayanan yang sak dan me ngadab abal perogakan dan abal berencana yang ada di barwasan tempat tinggalnya												



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Realisasi QTD	Realisasi Capaian AFNIA QTD Tahun 2023	Prestasi Capaian Target AFNIA QTD	Capaian Berupa Dan Urangla Perencanaan						Sifat Anggaran	Prestasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Persempitan
							Target 2023	Pagu Indikat (Rp)	Uraian	Sumber Dana	Pencapaian			Fisik	Fungsional	
											Manusia	Darab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	03	203	0012	Altruisme dan Komando Perencanaan Daerah				3 Laporan	11.167.300,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		110.000.000,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H
1	03	204		Pelayanan Sulin Dasar Persempitan Daerah			100 Persen	100%	53.000.000,00			-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		530.000.000,00	
1	03	204	0001	Perencanaan Regional Persempitan Daerah				0 Do Lemna	0,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		0,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H
1	03	204	0003	Seja Sama dalam Lembaga dan Semesta dalam Persempitan Daerah				0 Do Lemna	0,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		0,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H
1	03	204	0004	Persempitan dan Pemanfaatan Sulin Informasi				0 Do Lemna	0,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		0,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H
1	03	204	0005	Pembinaan dan Penguatan Persempitan Daerah				0 Laporan	0,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		0,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H
1	03	204	0007	Persempitan Capaian 3 DM Apasuli Persempitan Daerah				0 Uang	0,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		0,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H
1	03	204	0008	Pembinaan Persempitan Daerah				0 Uang	0,00	Sab. Btla, Dana Kecamatan, Dana Inf/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PS - Message Hevoni Sosial Dan Nam Oragan Wicakana Saha Dayana Dan Ing Langga HD ay P-3 Permatayan Infusio Uai Ploem mior Ka Daya Dala ng Ing Langga HD ay		0,00	SA DA H P P K A M G G U L A N G A H B I M C A M A D A P K A H

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Berencana OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2025	Pra-kiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan					Kategori Sasaran	Pra-kiraan Maju Berencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	05	05	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	18.000.000,00	Kab. Bitar, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA AID KASI UMUM	-	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Akiri dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP-5 Pemertapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup		000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	05	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota				0 Lembaga	0,00	Kab. Bitar, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA AID KASI UMUM	-	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Akiri dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP-5 Pemertapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	05	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data pendudukan di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				0 Lapangan	0,00	Kab. Bitar, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA AID KASI UMUM	-	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Akiri dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP-5 Pemertapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	05	2.04	0014	Penguatan Kelenjangan Bencana Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Bitar, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA AID KASI UMUM	-	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Akiri dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP-5 Pemertapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	05	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPENBA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	57.000.000,00	Serua Kota/Kab, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA AID KASI UMUM	-	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Akiri dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP-5 Pemertapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							J U M L A H			3.989.548.207,00						8.025.966.855,00	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif tentang langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Setiap program dan kegiatan yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

Dalam uraian berikut, akan dijelaskan secara terperinci mengenai masing-masing program dan kegiatan, termasuk tujuan, sasaran, serta alokasi anggaran yang direncanakan. Uraian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat dan wilayah yang menjadi fokus dari BPBD.

Pada Tahun Anggaran 2024 jumlah program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Blitar adalah sebanyak 2 program dan 9 kegiatan serta 24 sub kegiatan. Dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan sebesar Rp 3.989.548.207,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).

Masing-masing program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, indikator kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.353.209.815,00 terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan melalui 2 sub kegiatan anggaran Rp.0 yaitu:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu 2 dokumen perencanaan ( Renja Perubahan Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026).

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu 10 dokumen evaluasi kinerja (Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, LkjIP, LPPD, LKPD, Laporan SPM, Evaluasi PPRG, Evaluasi SAKIP )
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan administrasi keuangan perangkat daerah dengan 2 sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 20 orang/bulan selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 2.062.980.707,00.
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikator kinerja jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan output 200 dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), kegiatan ini berisi pembayaran honor pengelola keuangan dan pengelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan anggaran sebesar Rp. 15.660.000.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran dengan 5 Sub Kegiatan yaitu:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket belanja alat listrik dengan anggaran sebesar Rp. 4.650.345.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket yaitu alat untuk belanja tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta biaya sewa kendaraan dinas pejabat eselon II dengan seluruh anggaran sebesar Rp. 206.156.947,00.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 3 paket yaitu

belanja barang habis pakai (isi tabung gas), perabot kantor serta bahan natura dengan anggaran sebesar Rp. 13.522.311,00.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket bahan cetak dengan anggaran Rp. 11.048.849,00, serta
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 180 laporan perjalanan dinas serta penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dengan anggaran sebesar Rp. 226.060.000,00
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja Persentase kecukupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah melalui 3 sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan untuk belanja tagihan telepon dan listrik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 26.350.000,00.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan untuk pemeliharaan komputer kantor dengan anggaran Rp. 14.600.000,00, dan
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan untuk pembayaran kebutuhan honorarium THL BPBD selama 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 661.971.448.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik dengan 2 sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan dinas operasional atau

lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 31 unit kendaraan dinas operasional, kegiatan ini untuk belanja BBM , suku Cadang, dan belanja pengurusan pajak kendaraan dinas/operasional selama satu tahun dengan anggaran sebesar Rp. 104.109.208,00.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 10 unit AC kantor dengan anggaran Rp. 6.100.000,00.

2. Program Penanggulangan Bencana dengan pagu indikatif sebesar Rp.636.338.392.00 terdiri dari 4 Kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana indikator kinerja Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana dengan 1 sub kegiatan yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman bencana), indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun yaitu kepada 874.378 orang/warga di seluruh daerah rawan bencana Kabupaten Blitar melalui kegiatan penyediaan papan himbauan kebencanaan untuk daerah rawan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 32.500.000,00, serta sosialisasi dan penyebaran informasi bencana melalui tatap muka maupun media sosial yang ada.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana indikator kinerja Persentase desa/kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan 3 sub kegiatan yaitu
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, indikator kinerja Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 346,026,040.00 melalui kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana (DESTANA) 3 kawasan (Kelurahan Karangrejo, Desa Kalitengah dan Desa Selokajang), kegiatan pembentukan Sekolah Aman Bencana

(SPAB) pada 1 sekolah, Penyusunan Dokumen IKD serta kegiatan Sapa Destana/Pertemuan FPRB.

- Penyusunan Rencana penanggulangan bencana kabupaten/Kota, indikator Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal dengan output 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00, dan
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu melalui kegiatan pelatihan wanita tangguh bencana dan kegiatan pelatihan kepada relawan bencana dengan anggaran Rp. 34.399.852,00.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana indikator kinerja Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana dengan 4 sub kegiatan yaitu:
- Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat dengan target output 3 dokumen penetapan SK Tanggap Darurat bencana dengan anggaran sebesar Rp.15.060.000,00, yang berisi kegiatan operasional aktivitas lapangan penanganan darurat bencana.
  - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota, indikator Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana dengan target 50 orang korban bencana, melalui kegiatan operasional SAR dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00.
  - Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target output 50 orang penerima bantuan logistik dengan anggaran sebesar Rp.58.125.000,00 melalui kegiatan belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Stimulan Darurat Bencana serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota melalui target output 3 Laporan pengaktifan pos komando atas kejadian bencana dengan anggaran sebesar Rp. 11.167.500,00
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana indikator kinerja Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP dengan 2 sub kegiatan yaitu:
- Koordinasi Penanganan Pasca Bencana kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan melalui output 1 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rangka koordinasi penanganan pasca bencana dengan anggaran sebesar Rp. 18.060.000,00.
  - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dengan output 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,00.

Rincian yang telah dijelaskan di atas disajikan secara lebih lengkap dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program / Kegiatan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 3.353.209.815,00</b>
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu</i>	<i>Kab.Blitar</i>	<i>100%</i>		<i>0</i>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Blitar	2 dokumen	Renja Perubahan Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026	0
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Blitar	10 dokumen	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Tribulan IV Tahun 2025, LkjIP, LPPD, LKPD, Laporan SPM, Evaluasi PPRG, Evaluasi SAKIP	0

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 2.078.640.707,00</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Blitar	20 orang/bulan	20 orang ASN	Rp. 2.062.980.707,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Blitar	200 dokumen	Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar)	Rp. 15.660.000,00
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 461.438.452,00</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	1 paket	belanja alat listrik	Rp. 4.650.345,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	5 paket	belanja tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta biaya sewa kendaraan dinas pejabat eselon II	Rp. 206.156.947,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab.Blitar	3 paket	belanja barang habis pakai (isi tabung gas), perabot kantor serta bahan natura	Rp. 13.522.311,00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Blitar	1 paket	bahan cetak	Rp. 11.048.849,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik	Anggaran	
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Blitar	180 laporan	laporan perjalanan dinas serta penyediaan makanan dan minuman untuk rapat	Rp. 184.000.000,00
<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 702.921.448,00</b>
1.4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Blitar	12 laporan	belanja tagihan telepon dan listrik kantor	Rp. 26.350.000,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	1 laporan	pemeliharaan komputer kantor	Rp. 14.600.000,00
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Blitar	12 laporan	honorarium 23 orang THL BPBD	Rp. 661.971,448,00
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 110.209.208,00</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Blitar	31 unit	belanja BBM , suku Cadang, dan belanja pengurusan pajak kendaraan dinas/operasional	Rp. 104.109.208,00
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Blitar	10 unit	AC kantor	Rp. 6.100.000,00
<b>2.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 636.338.392,00</b>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik	Anggaran	
		<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		
		<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		
		<b>Persentase penyelesaian dokumen pascabencana</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		
<b>2.1</b>	<b><i>Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana</i></b>	<b><i>Kab.Blitar</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>Rp. 32.500.000,00</i></b>	
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab.Blitar	874.378 orang	penyediaan papan himbauan kebencanaan, penyebaran informasi bencana melalui tatap muka maupun media sosial	Rp.32.500.000,00
<b>2.2</b>	<b><i>Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana</i></b>	<b><i>Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan</i></b>	<b><i>Kab.Blitar</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>Rp. 455.425.892,00</i></b>	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik	Anggaran	
		<b><i> Pencegahan dan kesiapsiagaan</i></b>				
2.2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Blitar	5 kawasan	DESTANA) 3 kawasan (Kelurahan Karangrejo, Desa Kalitengah dan Desa Selokajang), kegiatan pembentukan Sekolah Aman Bencana (SPAB) pada 1 sekolah, Penyusunan Dokumen IKD serta kegiatan Sapa Destana/Pertemuan FPRB.	Rp. 346.026.040,00
2.2.2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab.Blitar	1 dokumen	Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2010)	Rp. 75.000.000,00
2.2.3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab.Blitar	100 orang	Pelatihan Wanita tangguh bencana, Pelatihan Relawan Penanggulangan bencana	Rp. 34.399.852,00
<b>2.3</b>	<b><i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana</i></b>	<b><i>Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana</i></b>	<b><i>Kab.Blitar</i></b>	<b><i>100%</i></b>		<b><i>Rp. 93.352.500,00</i></b>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab.Blitar	3 dokumen	SK Tanggap Darurat	Rp. 15.060.000,00
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab.Blitar	50 orang	Korban bencana	Rp. 9.000.000,00
2.3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Blitar	50 orang	Penerima logistik korban bencana	Rp. 58.125.000,00
2.3.3	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Blitar	3 laporan	Laporan aktivasi pos komando penanganan darurat bencana	Rp. 11.167.500,00
<b>2.4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 55.060.000,00</b>
2.4.1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab.Blitar	1 kegiatan	Laporan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Rp. 18.060.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja/ Output Spesifik		Anggaran
2.4.2	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab.Blitar	1 dokumen	Dokumen JITUPASNA	Rp. 37.000.000,00
						<b>Rp. 3.989.548.207,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini merupakan pelengkap sekaligus penajaman dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2025. Rencana kerja ini juga memberikan gambaran mengenai target pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang pengukurannya menggunakan indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar akan melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan serta 24 sub kegiatan. Koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat di antara para pelaku penanggulangan bencana serta disiplin dan profesionalitas yang tinggi dari setiap aparat BPBD menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Blitar.

Rencana kerja ini menggambarkan komitmen kami dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana secara efektif dan efisien, serta menggambarkan arah dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan bencana di Kabupaten Blitar. Melalui Renja ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sinergis dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi seluruh masyarakat.

#### 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menghadapi kemungkinan ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dan kebutuhan yang telah direncanakan antara lain:

- a. Prioritas Pelaksanaan Program: dalam kondisi di mana anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan yang telah diidentifikasi, prioritas pelaksanaan diberikan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Program-program yang bersifat mendesak dan vital perlu diprioritaskan untuk menjamin keberlanjutan upaya perlindungan dan keselamatan masyarakat.
- b. Optimalisasi Sumber Daya: diperlukan upaya optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, termasuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran.
- c. Fleksibilitas dan Penyesuaian: melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan jika terjadi perubahan signifikan dalam alokasi anggaran. Fleksibilitas dalam pengelolaan dan penyesuaian anggaran harus diterapkan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi program tanpa mengurangi kualitas layanan dan pencapaian tujuan.
- d. Evaluasi dan Monitoring: Penting untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program, terutama terkait dengan penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Penggalangan Dana Alternatif: Dalam kondisi anggaran terbatas, BPBD juga perlu mempertimbangkan penggalangan dana alternatif, seperti melalui kerja sama dengan sektor swasta, bantuan dari pemerintah pusat, maupun dana hibah, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

## 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2025, terdapat beberapa kaidah yang menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kaidah-kaidah ini meliputi:

- a. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan: setiap kegiatan yang dilaksanakan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar tahun 2025. Kepatuhan ini penting untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

- b. Partisipasi dan Kolaborasi: pelaksanaan Renja harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi yang baik di antara pihak-pihak ini akan memperkuat upaya penanggulangan bencana dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: setiap tahap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, baik dalam hal penggunaan anggaran maupun hasil yang dicapai. Akuntabilitas menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya, sehingga setiap program dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.
- d. Efisiensi dan Efektivitas: optimalisasi sumber daya yang ada harus selalu menjadi perhatian utama. Setiap program dan kegiatan harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga, sambil tetap memastikan hasil yang efektif dalam penanggulangan bencana.
- e. Adaptabilitas: dalam menghadapi dinamika dan perubahan situasi, BPBD harus tetap adaptif. Penyesuaian terhadap kondisi lapangan, perubahan anggaran, serta respon terhadap kejadian-kejadian tak terduga harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Renja. Fleksibilitas ini akan memastikan bahwa BPBD tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. Monitoring dan Evaluasi Berkala: pelaksanaan Renja harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang konsisten. Hal ini bertujuan untuk menilai kemajuan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar tujuan akhir dapat tercapai sesuai dengan rencana.

### 3. Rencana tindak lanjut.

Setelah penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2025 ini, terdapat beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat segera diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana tindak lanjut ini meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Operasional: sebagai tindak lanjut, BPBD akan menyusun rencana operasional yang lebih rinci berdasarkan Renja yang telah disahkan. Rencana operasional ini akan mencakup jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan agar setiap program dapat dilaksanakan dengan efektif.
- b. Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama: BPBD akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat pemerintah daerah, provinsi, maupun dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Kerja sama ini penting untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program, terutama dalam situasi darurat atau ketika menghadapi keterbatasan sumber daya.
- c. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: BPBD akan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Renja. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan terhadap program-program yang sedang berjalan, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Blitar, 19 Agustus 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Blitar



IVONGBERTTYANTO, S.T., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730518 199901 1 001